

Pendidikan Berbasis Masyarakat sebagai Upaya Penguatan Relevansi Pendidikan Formal di Indonesia: Systematic Literature Review

Nurul Hikmah¹, Firyal Aulia Indira¹, Hera Distya Ramadhania¹, Andika Maulidi¹, Masduki Ahmad²

¹Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

²Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze and synthesize empirical research on community-based education to provide a comprehensive understanding of how it strengthens the relevance of formal education in Indonesia. A Systematic Literature Review (SLR) was conducted following the PRISMA 2020 guidelines, using Publish or Perish with the Google Scholar database. From an initial 200 articles identified using the keywords "Pendidikan Berbasis Masyarakat" and "Community Based Education" (2021–2025), a rigorous screening and eligibility process resulted in 8 articles that met all inclusion criteria for in-depth analysis. The findings reveal that community-based education strengthens the relevance of formal education through four interrelated dimensions: community participation, multi-stakeholder collaboration, integration of local wisdom, and sustainable financing support. Community participation shifts from passive support toward collaborative governance, though it remains largely representative rather than fully deliberative. Multi-stakeholder collaboration proves effective when built on bottom-up initiatives rather than formal structures alone. Local wisdom integration enhances contextual and meaningful learning but shows inconsistent implementation patterns across regions. Sustainable financing requires diversification beyond government budgets through partnerships, philanthropy, and community self-reliance schemes. Overall, the success of community-based education depends on three key prerequisites: substantive community capacity, participatory institutional support, and clear coordination and resource diversification mechanisms.

 OPEN ACCESS

ARTICLE HISTORY

Received: 01-08-2026

Revised: 21-08-2026

Accepted: 23-08-2026

KEYWORDS

community-based education, formal education relevance, community participation, community empowerment

Corresponding Author:

Nurul Hikmah

Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Email: nurulhikmah.unj23@gmail.com

Pendahuluan

Pendidikan di Indonesia pada dasarnya diarahkan untuk membangun bangsa yang merdeka, berdaulat, serta dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan masyarakat (Hakim, 2023). Namun, pada kenyataannya sistem pendidikan masih menghadapi persoalan serius. Salah satu tantangan yang dihadapi yaitu rendahnya relevansi pendidikan dengan tuntutan masyarakat (Yaniariza *et al.*, 2022). Pendidikan di Indonesia sering kali terjebak dalam sistem yang masih terlalu berorientasi pada pencapaian akademik dan hasil ujian, sehingga dapat menghambat proses pembentukan makna belajar yang lebih mendalam dan personal bagi setiap peserta didik (Ningrum *et al.*, 2025). Kondisi tersebut menyebabkan penyelenggaraan pendidikan cenderung kurang responsif terhadap kebutuhan lokal, karakteristik masyarakat, serta dinamika sosial yang terus berkembang. Akibatnya, pendidikan belum sepenuhnya mampu menghasilkan individu yang siap menghadapi kebutuhan dunia kerja maupun kehidupan sosial secara nyata.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan globalisasi juga menuntut pendidikan untuk lebih adaptif. Bahkan menurut Sari *et al.*, (2023), tidak ada orang yang dapat menghindari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan seperti ketimpangan kualitas pendidikan, keterbatasan sarana prasarana, serta rendahnya kesiapan sumber daya manusia. Selain itu, pendidikan abad ke-21 dituntut untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan adaptasi, tetapi kenyataannya transformasi tersebut belum merata di semua wilayah (Jati dalam Anjani *et al.*, 2026). Kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan masyarakat juga tampak dari ketimpangan akses dan kualitas pendidikan. Tidak semua individu memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak, terutama untuk masyarakat yang berada di daerah terpencil, di mana kesenjangan akses terhadap teknologi dan kualitas pendidikan menunjukkan bahwa tidak semua individu memiliki peluang yang sama (Dewi dalam Anjani *et al.*, 2026).

Di samping persoalan akses dan kualitas, tantangan lain yang masih dihadapi adalah belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah dan penyelenggaraan pendidikan, karena partisipasi masyarakat masih cenderung terbatas pada implementasi program-program pendidikan dan lebih dipahami sebagai bentuk mobilisasi untuk mendukung kepentingan pemerintah daripada sebagai keterlibatan aktif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengembangan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Rusydi dan Munawar, 2022). Akibatnya, pendidikan belum mampu mendorong tumbuhnya kemandirian komunitas dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian yang integral dari proses pendidikan itu sendiri. Selain keterbatasan partisipasi, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat juga kerap terkendala oleh keterbatasan sumber pembiayaan, karena

sebagian besar program masih bergantung pada swadaya masyarakat yang belum dikelola secara sistematis dan berkelanjutan.

Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai praktik pendidikan masyarakat di Indonesia, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), pesantren, komunitas belajar, maupun sekolah berbasis kearifan lokal yang berkembang melalui partisipasi aktif masyarakat. Kehadiran berbagai bentuk pendidikan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki potensi besar untuk tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lingkungannya. Maka terlihat adanya gap yang cukup jelas antara tuntutan pendidikan dengan praktik penyelenggaraan pendidikan yang masih belum sepenuhnya relevan, merata, dan kontekstual, terutama di era modern saat ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pendidikan berbasis masyarakat dari berbagai perspektif, mencakup pengelolaan lembaga pendidikan berbasis masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pendidikan, kolaborasi sekolah dan komunitas, pembiayaan berbasis swadaya masyarakat, hingga pengembangan kurikulum dan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat memiliki potensi untuk memperluas akses pendidikan, memperkuat keterlibatan masyarakat, serta meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan lokal. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya bersifat parsial dan hanya menyoroti satu aspek tertentu tanpa mengintegrasikannya ke dalam kerangka yang utuh. Misalnya, kajian tentang partisipasi masyarakat belum dikaitkan secara sistematis dengan dampaknya terhadap relevansi pendidikan formal, dan kajian tentang kearifan lokal belum disintesis dengan model pengelolaan pendidikan berbasis komunitas yang lebih luas. Temuan-temuan tersebut masih tersebar dalam berbagai konteks dan fokus kajian yang berbeda sehingga belum memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana partisipasi masyarakat, kolaborasi multipihak, integrasi kearifan lokal, dan pembiayaan berkelanjutan secara bersama-sama berkontribusi terhadap penguatan relevansi pendidikan formal. Selain itu, kebaruan artikel ini terletak pada sintesis sistematis berbagai temuan empiris untuk menjelaskan bagaimana partisipasi masyarakat, kolaborasi multipihak, integrasi kearifan lokal, dan pembiayaan berkelanjutan berkontribusi terhadap penguatan relevansi pendidikan formal di Indonesia.

Pendidikan berbasis masyarakat hadir sebagai solusi yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat, pemanfaatan potensi lokal, serta penguatan kemandirian. Bahkan, pendekatan ini dinilai mampu memperluas akses pendidikan bagi kelompok marginal karena bersifat fleksibel dan kontekstual (Hermawan dalam Anjani et al., 2026). Berbeda dengan pendekatan pendidikan yang bersifat sentralistik, pendidikan berbasis

masyarakat menempatkan masyarakat sebagai subjek yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya berupaya meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga memperkuat relevansi pendidikan dengan kebutuhan lokal dan mendorong terbentuknya komunitas yang mandiri dan berdaya. Dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan kekosongan kajian yang telah diidentifikasi, pendekatan pendidikan berbasis masyarakat perlu dikaji secara lebih komprehensif dan sistematis agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan di Indonesia.

Berangkat dari kesenjangan penelitian tersebut, studi ini merumuskan pertanyaan penelitian: bagaimana pola partisipasi masyarakat, kolaborasi multipihak, integrasi kearifan lokal, dan dukungan pembiayaan berkelanjutan berkontribusi terhadap penguatan relevansi pendidikan formal di Indonesia berdasarkan hasil-hasil penelitian empiris? Tujuan kajian Systematic Literature Review (SLR) ini adalah menganalisis dan mensintesis berbagai penelitian empiris mengenai pendidikan berbasis masyarakat guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif sebagai dasar pengembangan pendidikan yang relevan, partisipatif, dan berkelanjutan melalui sintesis berbagai artikel jurnal empiris yang dipilih secara sistematis dengan berpedoman pada PRISMA 2020 untuk menjamin transparansi dan ketelitian metodologis. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengelola pendidikan, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengembangan pendidikan yang berbasis kebutuhan masyarakat, memperkuat partisipasi dan kemandirian komunitas, serta mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

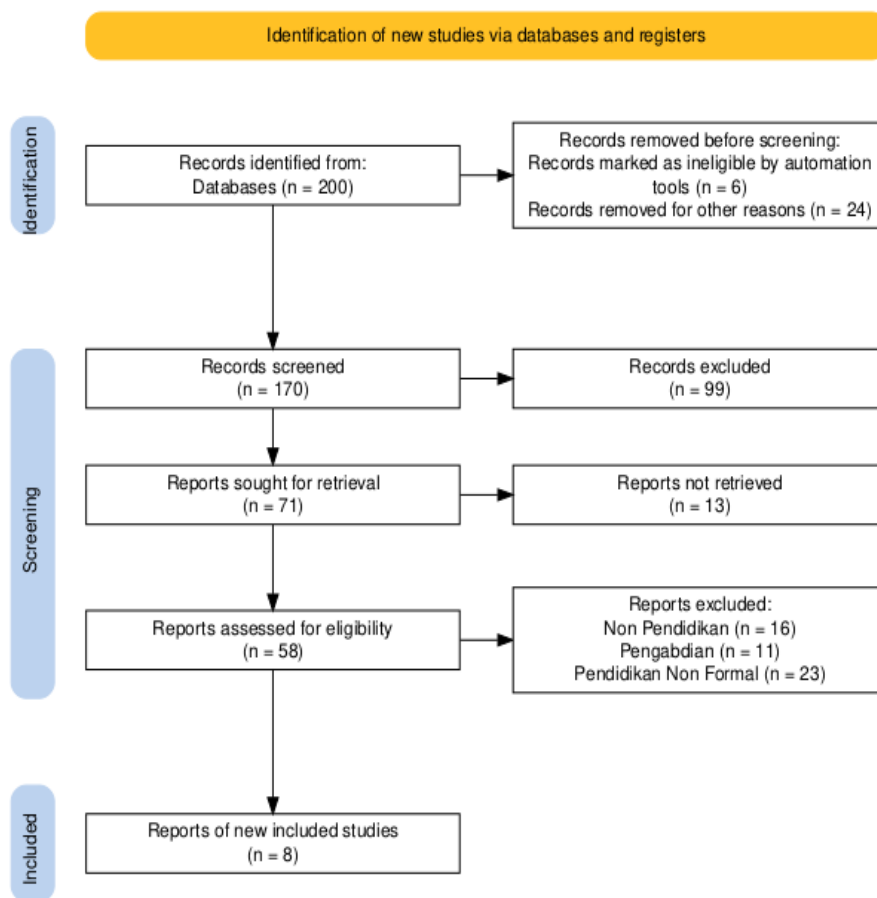
Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengacu pada pedoman PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Pedoman PRISMA 2020 dalam pelaporan systematic review berguna untuk meningkatkan transparansi, kelengkapan dan akurasi pelaporan (Page et al., 2021). Penggunaan flow chart PRISMA mendukung peneliti untuk mendokumentasikan secara sistematis melalui proses identifikasi, screening, dan eligibility sehingga proses seleksi artikel dapat ditelusuri dan direplikasi oleh peneliti lain (Haddaway et al., 2022)

Proses pencarian literatur menggunakan aplikasi Publish or Perish dengan basis data Google Scholar. Pencarian dilakukan dengan memasukkan kata kunci Pendidikan Berbasis Masyarakat dan atau *Community Based Education* dengan rentang tahun publikasi 2021-2025. Pada tahap identifikasi diperoleh sebanyak 200 artikel. Selanjutnya eliminasi awal dilakukan dengan menghapus 6 artikel yang terduplikasi dan 24 artikel yang tautan sumbernya tidak tersedia. Pada proses screening, terdapat 170 artikel yang dieliminasi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Kriteria inklusi meliputi (1) artikel jurnal ilmiah, (2) tersedia dalam bentuk full text, (3) berbahasa

Indonesia atau Inggris, dan (4) membahas topik Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM) atau *Community Based Education* (CBE). Adapun kriteria eksklusi meliputi buku, prosiding, skripsi, tesis, disertasi atau selain artikel ilmiah.

Hasil *screening* menunjukkan bahwa terdapat 99 artikel tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dan 13 artikel tidak dapat diperoleh naskah lengkapnya (*not retrieved*). Dengan demikian, 58 artikel yang memenuhi syarat untuk tahap eligibility. Pada tahap ini dilakukan pembacaan penuh (*full-text assessment*) dengan kriteria tambahan yaitu artikel harus membahas implementasi pendidikan berbasis masyarakat dalam konteks pendidikan formal. Sebanyak 50 artikel yang tereliminasi karena tidak sesuai dengan fokus kajian, maka diperoleh 8 artikel yang memenuhi seluruh kriteria dan dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini.



Gambar 1. Diagram Alur PRISMA

Hasil dan Diskusi

Pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia melalui berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan formal. Setiap penelitian yang ditemukan mempunyai konteks yang beragam mulai dari PAUD, sekolah dasar, madrasah hingga pesantren terdapat pola yang relatif konsisten mengenai bagaimana

masyarakat diposisikan sebagai mitra strategis dalam meningkatkan relevansi pendidikan. Analisis terhadap keseluruhan kajian memperlihatkan bahwa penguatan relevansi pendidikan formal dibangun melalui empat aspek utama yang saling berhubungan yaitu partisipasi masyarakat sebagai fondasi keterlibatan publik dalam pendidikan, kolaborasi multipihak yang memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, pemanfaatan kearifan lokal sebagai upaya menghadirkan pembelajaran yang kontekstual serta pembiayaan berbasis masyarakat yang mendukung keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan. Keempat dimensi tersebut membentuk suatu ekosistem pendidikan yang tidak hanya memperluas akses dan dukungan terhadap sekolah tetapi juga mendorong pendidikan formal agar lebih adaptif, responsif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan kecenderungan tersebut, pembahasan selanjutnya disusun ke dalam empat tema utama yang mempresentasikan pola-pola dominan dalam praktik pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia.

Tabel 1. Sintesis Kajian Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Meningkatkan Relevansi Pendidikan

Penulis	Temuan	Keterbatasan
Aprilyani & Anwar (2021)	Pengelolaan Pos PAUD Wijaya Kusuma menerapkan pendidikan berbasis masyarakat melalui keterlibatan aktif Pokja II PKK serta kemitraan dengan Posyandu, BKB, dan Puskesmas untuk mendukung layanan PAUD holistik integratif.	Berfokus pada pengelolaan satu lembaga PAUD tanpa mengkaji hasil belajar peserta didik maupun efektivitas program.
Zulkarnain & Zubaedi (2021)	Pengelolaan pesantren masih didominasi oleh pimpinan pesantren sehingga penerapan manajemen yang partisipatif, transparan dan profesional belum optimal	Terbatas pada aspek manajemen pesantren terkhusus fungsi pengelolaan dan pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh peran pimpinan pesantren.
Miskun <i>et al</i> (2023)	Mengidentifikasi tiga model pembiayaan berbasis swadaya masyarakat, yaitu subsidi silang, beasiswa pola bapak angkat bagi anak yatim/piatu, dan beasiswa hafalan Al-Qur'an, yang dilaksanakan melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.	Hanya membahas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pembiayaan, tidak membahas aspek kurikulum atau pembelajaran.
Anwar (2022)	Komite sekolah di tiga MTs Kecamatan Gabus telah menjalankan empat peran sesuai Permendikbud No. 75/2016 (penasehat, pendukung, pengendali,	Hanya membahas peran komite sekolah berdasarkan 4 fungsi Permendikbud No. 75/2016 (penasehat,

Penulis	Temuan	Keterbatasan
	perantara), namun efektivitasnya sangat bergantung pada tokoh masyarakat berpengaruh secara individual, bukan struktur organisasi.	pendukung, pengendali, perantara).
Adam et al (2024)	Kurikulum Merdeka Berbasis Masyarakat dapat meningkatkan relevansi pendidikan formal melalui integrasi budaya lokal, pendidikan karakter, dan pelibatan masyarakat dalam pembelajaran.	Berfokus pada evaluasi kurikulum secara kualitatif sehingga belum mengukur dampaknya terhadap hasil belajar, kualitas lulusan, dan keberlanjutan implementasi.
Nugraha <i>et al</i> (2025)	Kolaborasi sekolah, orang tua, dan masyarakat melalui <i>parenting</i> , program keagamaan, komunikasi, serta dukungan sarana meningkatkan motivasi belajar, karakter, dan mutu pendidikan, sekaligus memperkuat relevansi pendidikan formal berbasis masyarakat.	Hanya dilakukan pada satu sekolah swasta berbasis islam sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan ke konteks pendidikan formal yang lebih luas.
Hamidun & Mahmudah (2021)	Mengidentifikasi empat komponen manajemen partisipasi masyarakat dalam pendidikan, yaitu kemampuan, koordinasi, kontrol, dan kontribusi, yang masing-masing berkaitan dengan pengambilan keputusan, kerja sama, pengawasan, dan peran masyarakat melalui komite sekolah.	Hanya mencakup satu sekolah dasar, dengan jumlah partisipan yang terbatas pada kepala sekolah, guru, dan orang tua peserta didik, fokus kajian yang hanya mencakup empat aspek manajemen partisipasi masyarakat, yaitu kemampuan, koordinasi, kontrol, dan kontribusi.
Yusuf <i>et al</i> (2024)	Keberhasilan manajemen pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di MI Babullatulkhairaat diwujudkan melalui tiga program utama, yaitu Sigaro Malaha, Dodoto se Biasa, dan Pekan Maku Gawene.	Hanya mencakup satu madrasah, yaitu MI Babullatulkhairaat, dengan fokus kajian pada manajemen pendidikan karakter berbasis kearifan lokal melalui tiga program utama yang melibatkan delapan informan.

Sumber: Hasil *Systematic Literature Review* (SLR) yang dilakukan oleh Penulis

1. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan elemen utama dalam implementasi pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia. Keterlibatan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pemberian dukungan sumber daya, tetapi juga mencakup keikutsertaan dalam

perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, hingga evaluasi penyelenggaraan pendidikan. Pola ini selaras dengan pandangan Cohen dan Uphoff (1977) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan, implementasi, pemanfaatan hasil dan evaluasi. Kondisi tersebut merefleksikan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan hak sekaligus tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan telaah literatur, pola partisipasi masyarakat menunjukkan kecenderungan berkembang menuju tata kelola yang lebih kolaboratif. Hamidun dan Mahmudah (2021) mengemukakan bahwa penguatan peran masyarakat ditopang oleh empat dimensi yaitu *ability, coordination, control, contribution*. *Ability* merujuk pada kapasitas aktor pendidikan khususnya kepala sekolah dalam membuka ruang dan memfasilitasi partisipasi masyarakat; *coordination* menekankan pentingnya penyelarasan komunikasi dan kerja sama antara sekolah dengan berbagai unsur masyarakat; *control* berkaitan dengan fungsi pengawasan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik; *contribution* mencerminkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk dukungan dapat berupa pengambilan keputusan, penyediaan sumber daya, maupun representasi dalam forum kelembagaan. Hal serupa juga tampak pada pengelolaan Pos PAUD Wijaya Kusuma yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat melalui Pokja II PKK dan diperkuat melalui kerja sama dengan Posyandu, Bina Keluarga Balita serta Puskesmas (Aprilyani & Anwar, 2021). Praktik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lokal mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai penggerak utama dalam penyelenggaraan pendidikan ketika tersedia ruang yang memungkinkan mereka terlibat secara aktif.

Partisipasi masyarakat juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengalaman belajar peserta didik. Nugraha et al (2025) menunjukkan bahwa hubungan yang terbangun antara sekolah, orang tua dan masyarakat melalui kegiatan parenting, program keagamaan, dukungan sarana prasarana, serta komunikasi yang intensif mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Dampaknya terlihat pada meningkatnya motivasi belajar, kedisiplinan serta pembentukan karakter peserta didik. Dengan demikian, pendidikan berbasis masyarakat tidak hanya berimplikasi pada aspek manajerial tetap memiliki pengaruh terhadap proses pendidikan yang berlangsung di dalam dan di luar sekolah. Kecenderungan tersebut dapat dipahami melalui kerangka *School - Family - Community Partnership* yang dikembangkan Epstein (2018) antara sekolah, keluarga dan masyarakat dipandang sebagai lingkaran pengaruh yang saling beririsan (*overlapping spheres of influence*) sehingga keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas interaksi diantara ketiganya. Epstein mengidentifikasi enam bentuk keterlibatan yang perlu dikembangkan secara sinergis yaitu *parenting, communicating, volunteering, learning at home, decision-making dan collaborating with the*

community. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa semakin luas ruang keterlibatan yang diberikan kepada keluarga dan masyarakat semakin besar pula peluang peningkatan capaian akademik dan perkembangan sosial peserta didik (Epstein, 2018; Griffin & Steen, 2010).

Ditinjau melalui perspektif tangga partisipasi Arnstein (1969) sebagian praktik pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia telah bergerak menuju tingkat *partnership* yaitu kondisi ketika masyarakat mulai dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Namun demikian, keterlibatan tersebut pada banyak kasus masih didominasi oleh peran representatif melalui komite sekolah atau tokoh masyarakat tertentu. Laporan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (2023) bahkan menunjukkan posisi masyarakat dalam pendidikan formal masih cenderung berada pada fungsi konsultatif dan pemberian masukan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penguatan pendidikan berbasis masyarakat dalam pendidikan formal masih membutuhkan upaya yang lebih sistematis agar komunitas tidak hanya hadir sebagai pendukung tetapi juga memiliki kapasitas untuk ikut menentukan arah pengembangan pendidikan.

Sintesis kajian mengisyaratkan bahwa penguatan partisipasi masyarakat memerlukan pendekatan yang melampaui mekanisme formal kelembagaan. Kehadiran komite sekolah, forum komunikasi maupun wadah kolaborasi lainnya perlu diiringi dengan pembangunan kapasitas masyarakat, keterbukaan informasi serta budaya dialog yang berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan berbasis masyarakat dapat berkembang sebagai ruang bersama yang mempertemukan sekolah, keluarga dan masyarakat dalam upaya menghadirkan pendidikan yang lebih kontekstual, responsif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

2. Kolaborasi Multipihak

Kolaborasi multipihak dalam pendidikan merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan beberapa *stakeholder* secara bersamaan, yaitu sekolah, keluarga, dan komunitas (masyarakat di luar lingkup keluarga inti, termasuk tokoh masyarakat, komite sekolah, dan lembaga sekitar), dalam satu rangkaian proses yang saling terhubung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pendidikan. Kolaborasi tersebut menuntut adanya kesadaran bersama dan kesetaraan peran dalam bekerja sama (Nugraheni *et al.*, 2025). Keberadaan struktur formal seperti komite sekolah sering dianggap sebagai representasi kolaborasi ini, namun sebagaimana akan ditunjukkan dalam pembahasan berikut, struktur formal saja tidak otomatis menjamin kolaborasi tersebut berjalan secara substantif. Salah satu temuan penting dalam kumpulan kajian yang ditelaah adalah bahwa keberhasilan pendidikan berbasis masyarakat sangat ditentukan oleh sejauh mana kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas berjalan secara nyata, bukan sekadar formalitas administratif.

Nugraha et al. (2025), dalam studi kasus di SD Muslimin Panyawungan 02, Kabupaten Bandung, menemukan bahwa kolaborasi sekolah-komunitas yang efektif tidak terbangun melalui pendekatan *top-down*, melainkan tumbuh dari interaksi sosial yang bersifat *bottom-up* dan berbasis kebutuhan bersama. Temuan ini diperkuat dengan data empiris yang menunjukkan keterlibatan orang tua tidak hanya dalam pendanaan operasional melalui SPP, tetapi juga sebagai panitia dan pengelola kegiatan sekolah seperti Peringatan Hari Besar Islam dan khitanan massal. Selain itu, dalam penelitiannya teridentifikasi 6 domain keterlibatan yang merujuk pada kerangka Epstein, yaitu *parenting education* (edukasi tentang pengasuhan), *communicating* (komunikasi), *volunteering* (sukarelawan), *learning at home* (pembelajaran di rumah), *decision making* (pembuat keputusan), *collaborating with the community* (bekerjasama dengan komunitas) (Noerviana et al., 2024). Semua domain tersebut teridentifikasi nyata di lapangan, bukan sekadar konsep normatif. Pola komunikasi yang terjalin bersifat dual-mode (formal melalui rapat dan parenting class, informal melalui grup WhatsApp) juga tercatat sebagai faktor yang membangun *trust-based collaboration*. Dengan demikian, komunitas dalam kasus ini berfungsi sebagai mitra strategis, bukan sekadar pendukung administratif sekolah.

Gambaran serupa, meski dalam konteks pendidikan karakter berbasis kearifan lokal, ditemukan dalam penelitian Yusuf et al. (2024) di MI Babullatulkhairaat, Ternate. Kajian tersebut menyatakan terbentuknya komunitas “Sigaro Malaha” yang beranggotakan perwakilan orang tua, komite sekolah, guru, dan tokoh masyarakat, yang dibentuk melalui *forum group discussion* untuk mengidentifikasi masalah karakter anak secara lintas ranah, yaitu ranah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang menarik adalah penekanannya pada keterlibatan komunitas bukan hanya pada tahap perencanaan, melainkan juga implementasi program secara berkelanjutan, sebagaimana digambarkan langsung oleh kepala sekolah dalam wawancara penelitian tersebut. Kolaborasi yang harmonis sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif, relevan, dan berkelanjutan (Mustofa dan Salito, 2025). Berdasarkan temuan tersebut maka mengindikasikan bahwa pendidikan berbasis masyarakat diarahkan untuk memperkuat posisi masyarakat atau komunitas sebagai mitra strategis dalam pembangunan pendidikan.

Namun, gambaran ideal mengenai kolaborasi multipihak di atas tidak berlaku universal. Anwar (2022) memberikan bukti lain melalui studi kasusnya terhadap peran komite sekolah di tiga madrasah di Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Meskipun secara konseptual literatur menekankan bahwa keberhasilan komite sekolah memerlukan sinergi semua stakeholder yang saling berkolaborasi dari perencanaan hingga evaluasi, temuan lapangan menunjukkan sebaliknya. Keterlibatannya dalam kebijakan substantif seperti anggaran hanya terjadi jika diminta pertimbangan oleh sekolah menunjukkan bahwa peran komite dalam pengambilan keputusan bersifat reaktif dan bergantung penuh pada inisiatif sekolah, bukan partisipasi aktif yang setara.

Berdasarkan wawancara terhadap 24 informan, bahkan ditemukan juga bahwa sebagian besar anggota komite bersifat pasif, dan hanya tokoh masyarakat tertentu dengan posisi sosial signifikan yang secara konsisten aktif memberikan dukungan. Pada akhirnya kajian menyimpulkan bahwa "tujuan yang diidamkan belum sepenuhnya berhasil" karena komite "belum memahami sepenuhnya peran dan fungsinya."

Temuan disfungsi tersebut dapat dikategorikan sebagai penemuan yang serius, mengingat Nurrooyan dan Rustam (2025) menegaskan bahwa keterlibatan komite sekolah dalam berbagai keputusan penting, seperti perencanaan program, evaluasi mutu, hingga pengawasan anggaran, dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap mutu pendidikan yang dihasilkan. Jika dikaitkan dengan kondisi yang ditemukan Anwar (2022), maka pasivitas komite sekolah dalam tiga ranah tersebut, yakni minimnya frekuensi pertemuan, keterlibatan anggaran yang sebatas menunggu permintaan sekolah, dan dominasi peran oleh segelintir tokoh saja, bukan sekadar persoalan kelembagaan yang berdiri sendiri, melainkan berpotensi berdampak langsung pada rendahnya mutu pendidikan yang dihasilkan satuan pendidikan tersebut.

Ketiga temuan tersebut, jika disandingkan menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak dalam pendidikan berbasis masyarakat bukanlah kondisi yang otomatis tercapai begitu struktur formalnya, seperti komite sekolah atau forum komunitas, dibentuk. Faktor pembeda antara kasus yang berhasil (Nugraha *et al.*, 2025; Ramli Yusuf *et al.*, 2024) dan yang kurang optimal (Anwar, 2022) tampaknya terletak pada sifat keterlibatannya, apakah kolaborasi tersebut tumbuh dari kebutuhan dan inisiatif bersama secara *bottom-up* ?, ataukah sekadar struktur formal yang dibentuk untuk memenuhi regulasi tanpa mekanisme keterlibatan yang jelas dan berkelanjutan? Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan kebijakan atau struktur kelembagaan saja tidak cukup, dibutuhkan pula budaya komunikasi yang konsisten, rasa kepemilikan bersama, serta kepercayaan antarpihak agar kolaborasi multipihak dapat benar-benar berfungsi sebagai pilar penguatan relevansi pendidikan formal, bukan sekadar formalitas kelembagaan yang berjalan di permukaan.

3. Integrasi Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan gagasan yang timbul dan berkembang secara terus-menerus di dalam sebuah masyarakat berupa adat istiadat, nilai, tata aturan/norma, budaya, bahasa, kepercayaan, dan kebiasaan sehari-hari (Rummar, 2022). Hasil sintesis terhadap delapan artikel menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal merupakan salah satu strategi penting dalam implementasi pendidikan berbasis masyarakat. Meskipun tidak seluruh penelitian menjadikan kearifan lokal sebagai fokus utama, namun sebagian besar artikel menunjukkan bahwa pendidikan akan lebih bermakna apabila dikembangkan berdasarkan karakteristik sosial, budaya, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai mitra penyelenggara

pendidikan, tetapi juga sebagai sumber nilai, budaya, pengalaman, serta potensi lokal yang diintegrasikan ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran.

Temuan Adam, *et al.* (2024), menjelaskan bahwa integrasi kearifan lokal diwujudkan melalui penyusunan Kurikulum Operasional Madrasah yang mengakomodasi karakteristik masyarakat Tidore. Tema-tema seperti Local Wisdom, Sustainable Lifestyle, dan falsafah lokal Toma Loa Se Banari diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran sehingga peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga memahami budaya dan nilai yang berkembang di lingkungannya. Implementasi tersebut dilakukan melalui pembelajaran berbasis proyek seperti pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, kewirausahaan berbasis produk lokal, hingga pengenalan seni dan bahasa daerah. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Yusuf, *et al.* (2024) yang menempatkan kearifan lokal sebagai fondasi pendidikan karakter melalui kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat. Nilai-nilai budaya lokal tidak hanya dikenalkan sebagai materi pembelajaran, tetapi diintegrasikan melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari sehingga pembentukan karakter peserta didik berlangsung di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan berbasis masyarakat tidak hanya menghubungkan antara pendidikan formal dan lingkungan sosial tempat peserta didik tumbuh dan berkembang.

Selanjutnya, temuan Zulkarnain dan Zubaedi (2021), juga menjelaskan bahwa kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta diarahkan untuk menjawab dinamika sosial melalui penguatan nilai-nilai keagamaan, moral, dan pemberdayaan masyarakat. Kearifan lokal dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sumber nilai yang menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum, kepemimpinan, serta kemitraan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Kemudian, temuan Nugraha, *et al.* (2025), juga memperlihatkan bahwa integrasi konteks lokal dilakukan melalui kolaborasi sekolah dengan masyarakat dalam berbagai kegiatan seperti Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), *parenting*, kegiatan sosial, dan pelibatan tokoh masyarakat. Berbagai aktivitas tersebut menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih autentik dan sesuai dengan realitas kehidupan. Dengan demikian, beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai mitra sekolah, tetapi juga menjadikan budaya, nilai, tradisi, serta potensi lokal sebagai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan.

Meskipun hasil sintesis beberapa artikel tersebut menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal menjadi salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan relevansi pendidikan formal, namun implementasinya masih menunjukkan variasi yang cukup besar. Terdapat temuan penelitian yang mengintegrasikan kearifan lokal melalui pengembangan kurikulum dan pembelajaran berbasis potensi daerah, sementara itu

terdapat juga temuan penelitian yang lebih menekankan pada penguatan pendidikan karakter, tata kelola lembaga pendidikan, serta kolaborasi antara sekolah dan masyarakat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat belum memiliki pola implementasi yang sama. Di satu sisi, kondisi ini memberikan fleksibilitas bagi setiap daerah untuk mengembangkan pendidikan sesuai karakteristik dan kebutuhannya. Namun, di sisi lain, belum adanya kerangka implementasi yang jelas dapat menyebabkan kualitas penerapan pendidikan berbasis masyarakat menjadi berbeda-beda antarwilayah.

Selain itu, sebagian besar penelitian yang dianalisis masih berfokus pada bagaimana kearifan lokal diintegrasikan ke dalam proses pendidikan, seperti pengembangan kurikulum, pelaksanaan program, atau pelibatan masyarakat. Namun, penelitian yang mengevaluasi dampak nyata dari integrasi tersebut terhadap peningkatan hasil belajar, kompetensi peserta didik, maupun relevansi lulusan masih relatif sedikit. Berdasarkan keseluruhan hasil sintesis tersebut, maka dapat dipahami bahwa integrasi kearifan lokal memiliki kontribusi dalam memperkuat relevansi pendidikan formal di Indonesia. Integrasi budaya lokal ke dalam kurikulum, pembelajaran, pendidikan karakter, serta tata kelola lembaga pendidikan menjadikan proses pendidikan yang lebih kontekstual, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini juga memperkuat hubungan timbal balik antara sekolah dan masyarakat sehingga pendidikan tidak lagi hanya terpisah dari kehidupan sosial, melainkan sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, implementasinya tetap masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar manfaatnya dapat dibuktikan secara lebih kuat, sehingga diperlukan penelitian selanjutnya yang mengkaji dampak integrasi kearifan lokal tersebut terhadap kualitas lulusan, kompetensi abad ke-21, serta kesiapan peserta didik dalam menghadapi kebutuhan masyarakat.

4. Dukungan Pembiayaan Berkelanjutan

Pembiayaan merupakan salah satu pilar krusial yang menentukan keberlangsungan pendidikan berbasis masyarakat, sebab tanpa dukungan finansial yang memadai, berbagai inisiatif partisipasi, kolaborasi, maupun integrasi kearifan lokal yang telah dibahas sebelumnya sulit dipertahankan secara konsisten. Selama ini, sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia masih sangat bergantung pada anggaran pemerintah melalui APBN dan APBD, sementara kontribusi masyarakat dan sektor swasta masih bersifat suplemen ter dan belum terintegrasi secara kelembagaan (Setiawan et al., 2026). Ketergantungan yang berlebihan pada anggaran negara ini menimbulkan kerentanan struktural, terutama pada saat terjadi tekanan fiskal atau ketimpangan kapasitas anggaran antardaerah, sehingga pendidikan berbasis masyarakat memerlukan sumber pembiayaan yang lebih beragam dan berkelanjutan agar tidak semata-mata bergantung pada satu aktor (Kurniawati et al., 2026).

Beberapa kajian menunjukkan bahwa keberlanjutan pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan hasil dari kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta secara simultan. Kurniawati et al. (2026) menjelaskan bahwa pemerintah berperan sebagai regulator dan penyedia anggaran utama, lembaga pendidikan berfungsi sebagai pengelola operasional keuangan, masyarakat berkontribusi melalui partisipasi dan pengawasan sosial, sedangkan sektor swasta mendukung melalui CSR, kemitraan, dan investasi pendidikan. Pola serupa juga ditemukan dalam model pembiayaan berbasis kemitraan (*partnership-based financing*) yang dikemukakan Setiawan et al. (2026), yang menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan idealnya dipahami bukan sekadar kewajiban belanja publik, melainkan sebagai investasi kolaboratif yang dibangun di atas tiga prinsip utama, yaitu kolaborasi, keberlanjutan, dan akuntabilitas. Model ini menunjukkan bahwa diversifikasi sumber pendanaan, termasuk dana abadi pendidikan (*endowment fund*), filantropi, dan pembiayaan berbasis wakaf, menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah (Kurniawati et al., 2026).

Temuan tersebut sejalan dengan praktik pembiayaan berbasis swadaya masyarakat yang ditemukan Miskun et al. (2023) pada beberapa sekolah Islam terpadu di Pekanbaru, yang berhasil mengembangkan tiga model pembiayaan mandiri, yaitu subsidi silang, beasiswa pola bapak angkat bagi anak yatim/piatu, dan beasiswa hafalan Al-Qur'an, yang dikelola melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan yang sistematis. Model semacam ini memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi sumber pendanaan tambahan, tetapi juga aktor yang mampu merancang mekanisme keuangan kolektif untuk menjawab kebutuhan pendidikan yang tidak sepenuhnya tercakup oleh pembiayaan pemerintah. Kecenderungan serupa tampak pula pada pengelolaan Pos PAUD Wijaya Kusuma Yogyakarta, yang berhasil menghimpun sumber daya dari iuran peserta didik, bantuan RT/RW, donatur tetap, dana desa, serta bantuan pemerintah untuk membiayai sarana pembelajaran, area bermain anak, dan kesejahteraan pendidik (Aprilyani & Anwar, 2021). Kedua temuan ini menegaskan bahwa kemandirian pembiayaan berbasis masyarakat dapat terwujud ketika terdapat mekanisme pengelolaan dana yang jelas, transparan, dan melibatkan berbagai sumber daya lokal secara terkoordinasi.

Namun demikian, keberhasilan pembiayaan berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh konteks tata kelola dan ruang partisipasi yang tersedia. Studi komparatif Choir et al. (2026) di Kabupaten Pati, Indonesia, dan Provinsi Champassack, Laos, memperlihatkan perbedaan mencolok akibat model pemerintahan yang berbeda. Sekolah negeri di Pati mampu mengembangkan sistem keterlibatan masyarakat yang efektif melalui forum formal seperti komite sekolah, yang menjadi ruang deliberatif untuk membahas kebutuhan pembiayaan di luar dana BOS, sehingga menumbuhkan modal sosial berupa kepercayaan dan norma resiprositas antara sekolah dan orang tua.

Sebaliknya, di Champassack, kebijakan pendidikan gratis yang sepenuhnya disentralisasi oleh pemerintah justru melemahkan partisipasi masyarakat karena tidak tersedia ruang bagi mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pembiayaan, sehingga modal sosial yang terbentuk cenderung lemah dan bersifat seremonial (Choir et al., 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pembiayaan berbasis masyarakat bukan semata soal ketersediaan dana, melainkan juga soal sejauh mana desentralisasi dan keterbukaan tata kelola memberi ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif, bukan hanya sebagai penyumbang dana tetapi juga sebagai mitra dalam perencanaan dan pengawasan.

Sintesis dari berbagai temuan di atas mengindikasikan bahwa dukungan pembiayaan berkelanjutan dalam pendidikan berbasis masyarakat masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, antara lain ketergantungan berlebihan pada anggaran pemerintah, lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, keterbatasan kapasitas manajerial kelembagaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dan sektor swasta akibat minimnya insentif dan kepercayaan (Kurniawati et al., 2026; Setiawan et al., 2026). Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi diversifikasi pembiayaan yang mengintegrasikan kemitraan, filantropi, dana abadi, dan skema wakaf pendidikan, disertai penguatan tata kelola keuangan digital yang transparan serta peningkatan kapasitas manajerial lembaga pendidikan (Setiawan et al., 2026). Dengan demikian, penguatan relevansi pendidikan formal melalui pendidikan berbasis masyarakat tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun ekosistem pembiayaan kolaboratif yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak hanya berperan sebagai sumber dana pelengkap, tetapi juga sebagai mitra strategis yang turut menentukan arah keberlanjutan pendidikan di lingkungannya.

Simpulan

Kajian *Systematic Literature Review* ini menunjukkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat (PBM) memiliki kontribusi multidimensional terhadap penguatan relevansi pendidikan formal di Indonesia, yang tercermin dari empat aspek utama yang saling berhubungan, yaitu partisipasi masyarakat, kolaborasi multi pihak, integrasi kearifan lokal, dan dukungan pembiayaan berkelanjutan. Pertama, PBM berpotensi memperkuat relevansi pendidikan karena menempatkan kebutuhan, potensi, dan karakteristik sosial-budaya lokal sebagai basis perencanaan dan pengembangan program, sebagaimana terlihat pada penerapan Kurikulum Merdeka berbasis komunitas di madrasah Tidore dan integrasi kearifan lokal Ternate dalam pendidikan karakter. Kedua, keberhasilan PBM sangat ditentukan oleh sejauh mana kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat berjalan secara substantif, bukan sekadar formalitas kelembagaan, sebagaimana tampak dari perbandingan antara kolaborasi *bottom-up* yang efektif di SD Muslimin Panyawungan dengan peran komite sekolah yang masih pasif dan reaktif di Kecamatan Gabus. Ketiga, PBM dapat mendorong kemandirian komunitas apabila masyarakat diberi ruang yang

nyata untuk mengambil keputusan, bukan sekadar dilibatkan sebagai peserta atau pendukung dana, seperti yang tampak pada praktik pembiayaan swadaya dan pengelolaan PAUD berbasis kelompok kerja masyarakat. Keempat, keberlanjutan pembiayaan pendidikan berbasis masyarakat menuntut diversifikasi sumber dana yang melampaui ketergantungan pada anggaran pemerintah, melalui skema kolaboratif yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta secara terkoordinasi, sebagaimana ditunjukkan oleh model pembiayaan berbasis kemitraan dan praktik subsidi silang di beberapa sekolah berbasis masyarakat, sekaligus diperkuat oleh temuan komparatif bahwa keberhasilan pembiayaan tersebut sangat bergantung pada ruang desentralisasi dan keterbukaan tata kelola yang tersedia bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi PBM sangat ditentukan oleh tiga prasyarat utama, yaitu kapasitas komunitas dalam berpartisipasi secara substantif, dukungan kelembagaan yang membuka ruang tata kelola partisipatif dan transparan, serta adanya mekanisme koordinasi, evaluasi, dan diversifikasi sumber daya yang jelas antara sekolah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Sejumlah studi yang dikaji justru menunjukkan bahwa prasyarat ini belum sepenuhnya terpenuhi, terlihat dari pengelolaan pesantren dan komite sekolah yang masih bergantung pada figur sentral tertentu, ketergantungan pembiayaan yang masih terpusat pada anggaran pemerintah, serta terbatasnya kapasitas manajerial kelembagaan dalam merancang kemitraan pembiayaan yang inovatif, sehingga partisipasi masyarakat belum sepenuhnya berkembang menjadi keterlibatan struktural yang berkelanjutan. Di antara berbagai model PBM yang teridentifikasi, model penelitian berbasis masyarakat dan model pendidikan berbasis nilai dan karakter masyarakat menunjukkan potensi paling besar untuk memperkuat relevansi sekaligus kemandirian pendidikan formal di Indonesia, karena keduanya membangun struktur kolaborasi jangka panjang antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, alih-alih hanya berorientasi pada penyelesaian masalah jangka pendek.

Kajian ini memiliki keterbatasan karena sepenuhnya bersifat tinjauan pustaka yang mensintesis temuan dari delapan artikel empiris, sehingga belum menguji penerapan model-model PBM secara langsung pada kasus tertentu maupun mengukur dampaknya terhadap hasil belajar atau tingkat kemandirian peserta didik dan komunitas secara empiris. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu diarahkan pada studi lapangan di berbagai bentuk lembaga pendidikan berbasis masyarakat, seperti PKBM, pesantren, komunitas belajar, atau sekolah berbasis kearifan lokal, untuk menelaah secara langsung bagaimana prasyarat kapasitas, dukungan kelembagaan, mekanisme evaluasi, dan skema pembiayaan berkelanjutan tersebut bekerja dalam praktik. Penelitian selanjutnya juga perlu mengevaluasi efektivitas PBM secara terukur, baik terhadap kemandirian peserta didik maupun komunitas, serta mengeksplorasi lebih jauh strategi diversifikasi

pembiayaan yang adaptif terhadap konteks sosial-ekonomi masing-masing daerah, agar kontribusi pendekatan ini terhadap penguatan relevansi pendidikan formal di Indonesia dapat diuji secara lebih kuat, bukan hanya disimpulkan dari sintesis konseptual.

Referensi

- Adam, A., Syawal, Z., Djasman, C. H., Sahjad, M. A., & Juliadarma, M. (2024). Evaluation of The Implementation of Community-Based Independent Curriculum in Madrasah in The City of Tidore Islands. *Golden Ratio of Social Science and Education*, 4(2), 94–103. <https://doi.org/10.52970/grsse.v4i2.832>
- Anwar, S. (2022). The Role Of The School Committee As A Mediator Between Educational Institutions And Village Communities In Madrasah Tsanawiyah, Gabus Sub-District, Grobogan Regency. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(2), 138–162. <https://doi.org/10.33509/jan.v28i2.1712>
- Aprilyani, T., & Anwar, Q. K. (2021). Manajemen Berbasis Masyarakat dalam Pengelolaan PAUD. *Journal of Nusantara Education*, 1(1), 9–18. <https://doi.org/10.57176/jn.v1i1.5>
- Choir, A., Putra, A. H. S., Arifin, Z., & Mibtadin. (2025). Community engagement in education financing: A multi-case study in Indonesia and Laos. *Multidisciplinary Science Journal*. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2026087>
- Cohen, J., & Uphoff, N. T. (1977). *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation, and Evaluation*. Center for International Studies, Cornell University.
- Epstein, J. L. (2018). *School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools (3rd ed.)*. Routledge.
- Griffin, D., & Steen, S. (2010). *School-Family-Community Partnerships: Applying Epstein's Theory of the Six Types of Involvement to School Counselor Practice*. *Professional School Counseling*, 13(4), 218–226.
- Haddaway, N. R., Page, M. J., Pritchard, C. C., & McGuinness, L. A. (2022). PRISMA2020: An R package and Shiny app for producing PRISMA 2020-compliant flow diagrams, with interactivity for optimised digital transparency and Open Synthesis Campbell Systematic Reviews, 18, e1230. <https://doi.org/10.1002/cl2.1230>
- Hamidun, E., & Mahmudah, F. N. (2021). Community Participation Management in Education at Public Elementary School 04 Manggalewa. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 7(01), 17–24. <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v7i01.3767>
- Hasmiati, H. (2015). Pendidikan berbasis masyarakat. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*, 7(1), 65–71. <https://doi.org/10.47435/AL-QALAM.V7I1.181>
- Kemdikbud. (2023). *Meningkatkan Kolaborasi Sekolah dan Orang Tua dalam Peningkatan*

Mutu Pendidikan. BPMP NTB.

- Kurniawati, M., Tularsih, S., & Sutrisno. (2026). The Role of Stakeholders in the Management of Sustainable Education Financing. *EDUSOSHUM Journal of Islamic Education and Social Humanities*, 6(2), 818-828. <https://doi.org/10.52366/edusoshum.v6i2.359>
- Miskun, M., Asmarika, A., Fitri, Y., Deprizon, D., & Wismanto, W. (2023). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Swadaya Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Sumberdaya Manusia. *Journal of Education Research*, 4(3), 1155–1161. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i3.382>.
- Mustofa, W., & Salito (2025). Peran stakeholder dalam pengelolaan lembaga pendidikan: kajian literatur terhadap hubungan sekolah, orang tua, dan komunitas. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 163-174.
- Nugraha, M. S., Fadilah, N., Mardhiyah, I. S. A., Sumarna, D., & Manpaluti, I. (2025). Strategi Efektif Kolaborasi Sekolah Dan Komunitas Dalam Mendukung Mutu Pendidikan Dasar: Studi Kasus Di Sd Muslimin Panyawungan 02 Kabupaten Bandung: Effective Strategies for School-Community Collaboration in Supporting the Quality of Education in Primary Schools. *Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 4(2), 341–359. <https://doi.org/10.70287/epistemic.v4i2.457>.
- Noerviana, A. P., Anwar, R. N., & Afifah, D. R. (2024). Implementasi Keterlibatan Orang Tua Dalam Model Epstein Di Cendekia Kids School Madiun. *Golden Childhood Education Journal (GCEJ)*, 5(2), 1-9. <https://doi.org/10.55719/gcej.v5i2.1552>.
- Nugraheni, D., Saragih, H. J. R., Setiawibawa, R., Kurniadi, A., & Supriatna, A. (2025). Model Komunikasi Bencana “Table Top Exercise” Dengan Kolaborasi Multi Pihak Dalam Pemulihan Pascabencana. *Indonesian Journal of Environment and Disaster*, 4(2), 87-102. <https://doi.org/10.20961/ijed.v4i2.2308>.
- Nurroyian, N., & Rustam, R. (2025). Keterlibatan Komite Sekolah Dalam Pengambilan Keputusan Tentang Mutu Pendidikan di SMP Negeri 26 Medan *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(02). <https://doi.org/10.30868/im.v8i02.8675>.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *PLOS Medicine*, 18(3), e1003583. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003583>
- Purnomo, & Solikhah, P. I. (2021). Concept of Community-Based Education in Indonesia. In Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and

- Social Science (ICONETOS 2020) (pp. 674-681). *Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020)*.
- Setiawan, P., Pujihartono, S. T., & Sutrisno. (2026). Innovations in Partnership Based Education Financing Models. *EDUSOSHUM Journal of Islamic Education and Social Humanities*, 6(2), 844-853. <https://doi.org/10.52366/edusoshum.v6i2.369>
- Suharto, T. (2005). Konsep dasar pendidikan berbasis masyarakat. *Cakrawala Pendidikan*, (3), 87599.
- Supian, A. (2021). Model Pendidikan Karakter Di Masyarakat. *Al-Hasanah : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1).
- Toni, Karim, A., Bahari, Y., & Warneri. (2024). Model Pendidikan Berbasis Komunitas. *Tumoutou Social Science Journal*, 1(2), 92–99. <https://doi.org/10.61476/xfvwr731>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah Republik Indonesia.
- Yusuf, R., Arifin, A. M., Octaviana, U., Abbas, S., Syawal, J., & Nurbaya, N. (2024). Integrating Local Wisdom in Character Education: A Collaborative Model for Teachers, Parents, and Communities. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 16(3), 4226–4238. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i3.5271>
- Zulkarnain, Z., & Zubaedi, Z. (2021). Implementation of Community-Based Education Management: A Case Study of Islamic Boarding Schools in Bengkulu City, Indonesia. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 16(6), 3305–3316. <https://doi.org/10.18844/cjes.v16i6.6560>.